

BAB III

PENDAPAT HASAN AL-BANNA TENTANG MULTIPRTAI

a. Biografi, Perjuangan dan Karya Hasan al-Banna

1. Biografi Hasan al-Banna

Hasan al-Banna dilahirkan di desa al-Mahmudiyah yang berada di wilayah al-Bahirah, di kawasan pedalaman Mesir, pada bulan Sya'ban 1324 H, bertepatan dengan bulan September 1906 M. Daerah kelahiran Hasan al-Banna dikenal sebagai daerah delta. Ayahnya bernama Syekh Ahmad 'Abdur Rahman al-Banna. Ia bekerja sehari-hari sebagai tukang arloji, karena itu ia digelari *al-sa'ati*.¹ Ia adalah seorang ulama dan menjadi imam shalat di Mesjid Mahmudiyah. Ia juga seorang ahli hadits dan mempunyai beberapa karangan dalam bidang tersebut (Iqbal, Nasution, 2010:189).

Masa kecil Hasan al-Banna dilalui dengan belajar *tahfizh al-Quran* yang dipelajari langsung melalui ayahnya. Ayahnya yang banyak memberikan pendidikan dasar keagamaan kepada Hasan al-Banna. Dalam hal pendidikan, ayah Hasan al-Banna menginginkan al-Banna menjadi seorang *hafidz* (seorang yang hafal al-Quran), tapi pada saat yang sama ayahnya tidak menginginkan al-Banna tertinggal dalam pengetahuan umum. Karena itulah, ayahnya memindahkan al-Banna dari *Madrasah Diniyah ar-Rasyad* ke *Madrasah I'dadiyah*. Di sini diajarkan tentang undang-undang pertanahan dan perpajakan dan sedikit tentang agrikultura dan tentu saja mempelajari tentang Bahasa Arab dan ilmu agama lainnya. Karena tidak ada program khusus untuk menghafal al-Quran di sekolah barunya, maka al-Banna diminta menghafal al-Quran di rumahnya, langsung dibimbing ayahnya (Candra 2005, 25).

¹ *Al-Sa'ati* secara etimologi berarti waktu atau jam. *Al-Sa'ati* sebenarnya bukan namanya, namun nama tambahan. Dalam Bahasa Arab biasa disebut *laqab* gelar nama yang diidentikkan dengan kebiasaan yaitu sebagai tukang jam.

Pada usia 12 tahun Hasan al-Banna telah menghafal separuh isi al-Quran, dan berkat kedisiplinannya dalam membagi waktu, akhirnya pada usia 14 tahun, Hasan al-Banna berhasil menghafal seluruh al-Quran (Mohammad 2006, 201). Hasan al-Banna, pada usia 12 tahun, ia pernah menyaksikan praktik zikir tarekat al-Hasafiyah dan menangkap kesan tentang kelapangan hati dan kesalehan orang tua serta kerendahan hati orang muda. Sejak itu nama Syekh Hasafiyah, guru tarekat tersebut melekat kuat dalam hatinya (Iqbal, Nasution, 2010:190). Hasan al-Banna bergabung dengan tarekat ini ketika berumur 13 tahun. Ikatan Hasan al-Banna dengan sufi membuatnya merasakan betapa penting hubungan antara pemimpin dan pengikut. Dalam memoarnya dia menguraikan bagaimana salah seorang guru pertamanya mengajarkan padanya cara menilai ikatan spiritual dan emosi yang dapat tumbuh antara guru dan murid (al-Banna 1999, 68-77).

Sementara itu pendidikan dasar formal dilalui Hasan al-Banna di Madrasah Diniyah al-Rashad. Madrasah tersebut dikelola oleh pemerintah. Kemudian dilanjutkan ke Madrasah al-I'dadiyah di al-Mahmudiyah. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya ke Dar al-Mu'allimin di Damanhur pada 1920. Di sekolah inilah ia menyelesaikan hafalan al-Quran yang telah dimulai sejak bersama ayahnya. Pada tahun 1923, Hasan al-Banna melanjutkan pendidikan formalnya ke sekolah tinggi di Dar al-Ulum, Kairo. Sekolah ini bertujuan untuk membina guru agama. Selama belajar di Kairo, keterlibatannya dengan tarekat Hasafiyah tidaklah terputus. Ia tetap terlibat dengan tarekat ini melalui cabang Kairo. Namun salah satu hal yang menarik diperhatikan adalah bahwa selama di Kairo, Hasan al-Banna banyak terlibat dengan perkembangan pemikiran atau situasi politik yang sedang melanda Mesir (Iqbal, Nasution 2010, 190-191).

Pada waktu masih berumur muda, Hasan al-Banna telah melibatkan dirinya dalam berbagai kegiatan keagamaan. Ia pernah memasuki *jama'ah Suluk Akhlaki*, yang memberi arti penting dalam pembentukan kepribadian Hasan al-Banna. Selanjutnya Hasan al-Banna bergabung dalam *Tarekat Ikhwan Hasafiah* seperti yang disebutkan di atas, yang nantinya sangat mempengaruhi kepribadian dan pemikirannya, terutama ajaran-ajaran tentang “persaudaraan sejati” (Candra 2005, 25).

Sedangkan talenta kepemimpinan Hasan al-Banna terlihat sejak usia remaja. Ketika menjadi siswa di *Madrasah I'dadiyah*, al-Banna mengusulkan untuk dibuat suatu organisasi sekolah yang disepakati dengan nama *Perhimpunan Akhlak Mulia*. Organisasi ini lebih menekankan agar setiap siswa untuk mempunyai *akhlakul karimah*. Jika terjadi pelanggaran dan tertangkap melakukan akhlak yang jelek, maka diganjar dengan denda. Di organisasi ini Hasan al-Banna menjadi ketuanya (Candra 2005, 26).

Sukses dengan organisasi-organisasi tersebut, organisasi selanjutnya diberi nama *Jama'iyah Man'a al-Muharram* (Asosiasi Anti Haram) organisasi ini bergerak untuk memberikan teguran secara tertulis pada yang melakukan dosa. Teguran ini diberikan dalam sehelai surat kepada orang yang melakukan dosa (Candra 2005, 26).

Sejak kecil, Hasan al-Banna sudah menunjukkan tanda-tanda kecemerlangan otaknya. Bahkan Hasan al-Banna lulus sekolah dengan predikat terbaik di sekolahnya dan kelima terbaik di seluruh Mesir. Di usia 14 tahun telah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi Dar al-Ulum, Universitas Kairo. Selain itu, ia juga memiliki bakat kepemimpinan yang cemerlang, Hasan al-Banna selalu terpilih sebagai ketua organisasi siswa di sekolahnya. Pada usia 21 tahun, al-Banna menamatkan studinya di Dar-al-Ulum dan ditunjuk menjadi guru di Isma'iliyah (Mohammad 2006, 202).

Aktivitas dakwah Hasan al-Banna bermula ketika dia masih seorang bocah tanggung. Pada usia 12 tahun, ia bergabung dengan Masyarakat untuk Tingkah Laku Moral. Hal ini menunjukkan bahwa bocah (Hasan al-Banna) kelahiran 1906 ini sudah tertarik pada masalah-masalah keagamaan sejak usia dini. Puncak aktivitas dakwahnya adalah saat mendirikan Ikhwanul Muslimin (IM) pada tahun 1928 (Mohammad 2006, 202).

Hasan al-Banna meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1949 dan sebelumnya gerakan al-Ikhwan al-Muslimun telah dibubarkan oleh pemerintah karena garis politik yang dianutnya dianggap berbahaya oleh pemerintah yang menempuh kerjasama dengan Inggris. Gerakan ini juga dianggap berbahaya karena, terutama setelah mendapatkan kesempatan dalam perang Palestina tahun 1948, mempunyai anggota-anggota yang terlatih secara militer. Al-Banna ditembak oleh polisi Rahasia Kerajaan sewaktu dalam perjalanan. Pada saat kematiannya lampu seluruh kota Kairo dimatikan untuk menjaga demonstrasi (bekas) anggota al-Ikhwan. Konon tidak seorang laki-laki yang dapat mendekati al-Banna kecuali ayahnya yang sudah tua umurnya, dan ia bersama empat orang wanita membawa jenazah al-Banna dari rumah sakit yang dijaga ketat oleh Angkatan Bersenjata, kemudian mereka menyolatkan jenazahnya dan menguburkannya (Mohammad 2006, 203).

Jadi, seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam sejarah perjalanan hidup Hasan al-Banna, ada tiga faktor yang sangat mempengaruhi dirinya. *Pertama*, faktor *internal*, yaitu kehidupan atau pembinaan keluarga. *Kedua*, faktor *eksternal*, pendidikan formal dan informal yang mempengaruhinya. Kedua faktor ini cukup mewarnai perjalanan hidupnya di kemudian hari. Richard P. Mitchell bahkan menyebutkan bahwa pendidikan informal dan pembinaan ayahnya mempunyai peranan yang lebih penting dalam mempengaruhi kehidupan Hasan

al-Banna dibandingkan pendidikan formalnya. Dan yang *ketiga*, faktor politik yang sedang berkejolak saat itu (Mitchell 1969, 322).

2. Perjuangan dan Karya Hasan al-Banna

1) Perjuangan Hasan al-Banna

Hasan al-Banna bukanlah satu-satunya tokoh pemikir atau pembaharu di Mesir, akan tetapi ulama-ulama besar telah menadahuinya seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Namun yang membedakan Hasan al-Banna dengan para pemikir Islam pendahulunya adalah ketika Hasan al-Banna mampu mengubah wacana menjadi sebuah gerakan. Itulah kontribusi terbesar Hasan al-Banna, dari pembaharu dan pembangkit Islam sebelumnya. Mereka pada umumnya prihatin dengan kondisi umat Islam yang terpuruk di bawah penjajahan Barat. Karena itu mereka merumuskan pemikiran tentang perlunya upaya memperbaiki kondisi umat Islam (Candra 2005, 21).

Di zaman al-Banna, Mesir ketika itu sedang mengalami ketidakmenentuan politik. Itu ditandai dengan selalu terjadinya pertikaian antara kelompok-kelompok politik yang ada. Persoalan lain adalah westernisasi yang mencengkrum begitu kuat. Dalam situasi itulah pematangan pikiran Hasan al-Banna berproses (Iqbal, Nasution 2010, 191).

Pada masa remaja al-Banna, dunia Islam sedang mengalami stagnasi kepemimpinan khilafah, yaitu Kerajaan Turki Usmani tidak lagi mampu menjalankan roda pemerintahan yang stabil. Situasi itu memuncak dengan runtuhnya khilafah Turki Usmani dan diproklamasikannya Republik Turki modern sekuler oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tanggal 2 Maret 1924 M atau bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1342 H (Iqbal, Nasution 2010, 191).

Selain itu, Mesir juga sedang mengalami pergolakan melawan pendudukan Inggris. Pemikiran nasionalisme yang dirintis oleh al-

Tahtawi (1801-1873) berkembang menjadi gerakan nyata, ketika pada tahun 1918, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Sa'ad Zaghlul (1859-1957) menghadap Komisaris Tinggi dan menyatakan diri sebagai wakil rakyat untuk meminta agar Inggris menghapus status protektorat atas negeri Mesir. Ketika itu al-Banna baru berusia 13 tahun (Iqbal, Nasution 2010, 192).

Selama abad ke-19, nasib politik dan ekonomi Mesir semakin erat dengan Eropa. Penetrasi finansial dan perdagangan asing di mana-mana dan kehadiran mereka semakin luas di Mesir, menyebabkan penguasa dan elite kaya negeri Mesir berperilaku dan beradat istiadat seperti orang Eropa. Dimensi kultural imperialisme ini melukai kepekaan Mesir dan memupuk sentimen anti-Eropa serta keinginan untuk menyingkirkan pengaruh asing. Pada tahun 1881, muncul suatu gerakan menentang dominasi politik, ekonomi dan budaya Eropa. Tetapi karena kelihatan mengancam investasi asing, gerakan ini mendorong Inggris melakukan invasi pada September 1882. Meski Inggris menyatakan akan pergi kalau kepentingan asing dilindungi, namun mereka tetap bercokol di bumi Mesir hingga abad ke-20 (Rahnema 1994, 127).

Inggris melembagakan suatu sistem pemerintahan tidak langsung, di mana Residen Inggris dan penasihatnya bekerja dengan dinasti yang berdiri sebelumnya pada abad ini, namun tak pernah lepas dari kekuasaan Utsmaniah. Selama sebagian periode sebelum Perang Dunia Pertama, Residen Inggris dan penguasa Mesir, yang dikenal dengan khedive atau raja muda, bekerja sama memerintah Mesir. Pada awal 1900-an, lahirlah sebuah gerakan nasionalis baru dan menyerukan kemerdekaan Mesir. Ketika meletus Perang Dunia Pertama, gerakan nasionalis ini sudah sampai pada puncaknya dan mulai merosot. Ketika imperium Utsmaniah berperang melawan Inggris, Inggris secara resmi memisahkan Mesir dari Utsmaniah dan

menyatakan protektorat atas Mesir. Pada akhir perang, pada tahun 1919, berdiri sebuah gerakan nasionalis populer untuk kemerdekaan Mesir. Hasan al-Banna yang baru berusia 13 tahun ikut demonstrasi menuntut kepergian Inggris dari tanah Mesir (al-Banna, 1990:84). Inggris menghadapi badai protes nasionalis, dan akhirnya membuat pernyataan sepihak soal kemerdekaan Mesir pada tahun 1922. Dengan demikian, iklim politik di seputar tahun-tahun awal kesadaran sosial al-Banna ditandai dengan dominasi asing dan perlawanan terhadap dominasi asing ini (Rahnema 1994, 127).

Pada tahun 1923, Banna melanjutkan studinya ke Kairo. Selama lima tahun di Kairo, dia menyaksikan iklim politik Mesir yang hidup, di mana dua partai politik terkemukanya selalu cekcok. Yang bahkan lebih penting adalah, dia langsung mengalami westernisasi kultural Mesir, yang dia samakan dengan ateisme dan ketidakbermoralan. Seperti banyak kaum muslim, dia prihatin melihat Mustafa Kemal Attaturk yang menghapus kekhalifahan dan program Kemal mensekularkan Turki. Gerakan Mesir yang mendirikan universitas negeri sekular pada tahun 1925, dalam pandangan Hasan al-Banna bisa jadi merupakan langkah pertama meniru Turki mencampakkan Islam. Dia juga memandang dengan prihatin banjir artikel koran dan buku yang mempromosikan nilai sekular Barat (al-Banna 1990, 102, 108-110).

Jadi, dapat dikatakan bahwa kondisi umat Islam di Mesir dan dunia pada umumnya saat itu berada dalam penjajahan bangsa Eropa, dan keadaan tersebut berpengaruh pada tatanan nilai-nilai sosial masyarakat, politik, ekonomi, dan pendidikan (al-Qaradhawi 2007, 2-3).

Selama menajalankan studinya di Dar al-Ulum, Hasan al-Banna menemukan orang yang sependapat dengannya, dan bekerja sama untuk mendirikan sebuah gerakan, yang mana gerakan ini bertujuan

untuk membangkitkan dunia Islam kembali. Gagasan pertama al-Banna untuk program aksi, melibatkan pembentukan organisasi yang dipimpin ulama yang akan mengilhami kebangkitan Islam. Dia menerima tanggapan simpati dari Muhibuddin al-Khatib, pembaru Suriah pengelola perpustakaan Salafiyah, yang menerbitkan jurnal mingguan untuk pembaruan Islam yang bernama *al-Fath*, dan ikut mendirikan Asosiasi Pemuda Muslim (YMMA). Asosiasi keagamaan ini, yang resminya berdiri pada November 1927, jelas menggambarkan gerakan pembaruan model baru. Hasan al-Banna mendirikan asosiasi seperti ini beberapa bulan kemudian, yang bernama Ikhwanul Muslimun (al-Banna 1990, 111-116).

Ikhwanul Muslimun didirikan oleh Hasan al-Banna pada Maret 1928, Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimun dengan tujuan untuk mempromosikan Islam sejati dan melancarkan perjuangan melawan dominasi asing. Selama empat tahun berikutnya, Hasan al-Banna membuka cabang di kota-kota zona kanal lainnya dan di delta Mesir. Ketika Menteri Pendidikan memindahkannya ke Kairo pada 1932, Ikhwanul Muslimin siap menjadi gerakan nasional. Bersama Hasan al-Banna, pusat Ikhwanul Muslimun pindah ke Kairo, dan dari sini menyebar ke seluruh Mesir. Organisasi ini bertambah besar dan mengembangkan struktur administrasi yang memungkinkan Hasan al-Banna memegang kendali kuat. Selama sepuluh tahun berikutnya, Ikhwan menerbitkan persnya sendiri (Rahnema 1994, 133).

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, sejak muda Hasan al-Banna telah mencurahkan perhatiannya pada agama Islam dengan aktifitas yang terorganisir dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam dakwah islamiyah. Walaupun sibuk dengan tugas belajar, selain organisasi di atas Al Banna bersama

teman-temannya juga berhasil mendirikan beberapa organisasi, yaitu:

a. Perhimpunan Akhlak Mulia

Organisasi ini bergerak di bidang akhlak, yakni organisasi yang mengupayakan pembentukan akhlak mulia bagi para anggotanya, dan adanya sanksi bagi anggota yang melanggar (berakhlak buruk). Sanksi tersebut berupa denda. Denda yang terkumpul akan digunakan untuk kebaikan dan kegiatan sosial. Seluruh anggota perhimpunan ini harus saling mengingatkan agar selalu berpegang teguh kepada agama, manunaikan shalat pada waktunya, menaati Allah, mematuhi kedua orang tua, mematuhi yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Hasan al-Banna menjadi ketua dalam perhimpunan ini. Perhimpunan ini berlangsung saat Hasan al-Banna *belajar di Madrasah I'dadiyah* (al-Banna 1999, 29).

b. Asosiasi Anti Haram

Aktivitas yang dilaksanakan dalam asosiasi ini adalah pemberian teguran kepada pelaku dosa. Teguran ini berupa pesan tertulis tanpa identitas pengirim. Pembuatan teguran sampai proses distribusi kepada pelaku dilaksanakan oleh anggota. Asosiasi ini berjalan sampai enam bulan. Saat itu Hasan al-Banna masih berstatus pelajar di *Madrasah I'dadiyah* (al-Banna 1999, 31).

c. *Jam'iyah al-Hashafiyah al-Khoiriyyah*

Bertujuan melindungi moralitas Islam dan membendung misionaris Kristen. Saat itu Hasan al-Banna baru berusia tiga belas tahun dan dia sebagai sekretaris dalam *jam'iyah* ini. Tahun terakhir pendidikan Hasan al-Banna di *Madrasah I'dadiyah* bertepatan dengan pecahnya Revolusi 1919 M. Hasan al-Banna berpartisipasi dalam demonstrasi di dalam dan luar sekolahnya,

dan mendeklamasikan puisi – puisi nasionalisme (Mitchell 1969, 5).

2) Karya-Karya Hasan al-Banna

Hasan al-Banna adalah profil seorang tokoh atau pembaharu yang benar-benar tertempa hidupnya dengan sikap mental yang terpuji seperti sederhana, selalu menghindari perselisihan apa lagi kekerasan, menghormati janji, suka mengalah, rajin, ulet, tabah, bijaksana, komunikatif, menghargai pendapat orang lain dan lain sebagainya. semua sifat dan sikap terpuji ini telah mengantarkan Hasan al-Banna menjadi seorang cendekiawan yang berwawasan luas dan berpandangan jauh sehingga dia mampu mencuatkan inovasi-inovasi di masanya yang sangat bermanfaat untuk kemajuan dan perkembangan agama (Ya'cub 2000, 141).

Selain itu, Hasan al-Banna nampaknya memang sosok yang dilahirkan untuk memimpin gerakan Islam. Ia seorang tokoh dan organisatoris yang tangguh. Di saat kondisi masyarakat Mesir baik politik, ekonomi, budaya maupun alam pikirannya telah diselimuti oleh kepentingan Eropa, maka beliau tampil membuat tekad suci dan gerakan untuk mengembalikan umat Islam Mesir kepada ajarannya yang benar. Dengan dilandasi rasa ikhlas dan tanpa mengharapkan sesuatu, beliau mampu dan berhasil merangkul berbagai kalangan. Kiranya tidaklah berlebihan jika Robert Jackson mengekspresikan tentang pribadi beliau (Ya'cub 2000, 141-142).

“Pada diri Hasan terhimpun kecerdikan politisi, kekuatan para panglima, hijrah para ulama, keimanan kaum sufi, ketajaman analisa para filosof, kepiawaian para aktor dan keindahan susunan kata para sastrawan” (Ya'cub 2000, 142).

Pada tanggal 12 Februari 1949, Hasan al-Banna meninggal karena ditembak oleh penembak misterius yang oleh banyak kalangan diyakini sebagai penembak “titipan” pemerintah. Kepergian

Hasan al-Banna pun menjadi duka berkepanjangan bagi umat Islam. selama Hasan al-Banna hidup ia sudah banyak menuangkan pemikirannya dalam bentuk tertulis (Mohammad 2006, 207). Sebagai seorang ulama, intelektual dan da'i yang ulet, Hasan al-Banna meninggalkan banyak karya, diantaranya : *Allah Fi al-Akidah al-Islamiah, Mudzakarot al-Da'wah wa al- Da'iyah* dan *Majmu'ah Rasa'il* (al-Banna 1998, 19).

Majmu'ah Rasail (kumpulan risalah), sesuai dengan namanya, kitab ini berisi kumpulan surat, makalah dan transkrip pidato yang pernah disampaikan oleh Hasan al-Banna sepanjang hayatnya di medan dakwah dan jihad (al-Banna 1999, 3). Kitab yang ditulis Hasan al-Banna ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh beberapa penerbit yakni penerbit Media Dakwah dengan judul Konsep Pembaruan Masyarakat Islam, Ikhwanul Muslimin, dan penerbit Al I'tishom dengan judul Risalah Dakwah Hasan al-Banna. *Majmu'ah Rasail* terdiri dari beberapa risalah yaitu :

- a) Sebagaimana yang disebutkan oleh Ali Abdul Halim Mahmud, yaitu "Risalah Akidah" (رسالة العقائد) ditulis pada tahun 1350 H /1931 M. Dalam risalah ini Hasan al-Banna mengumumkan target dan tujuan Ikhwan sejalan dengan masa pertumbuhannya. Dalam risalah ini juga ditetapkan berbagai dimensi dakwah Islamiyah, serta menegaskan sejak semula bahwa target Ikhwan adalah untuk mewujudkan kebaikan duniawi dan ukhrawi (Mahmud 2000, 365).
- b) Risalah Dakwah Kami (دعوتنا) ditulis pada tahun 1936 M. Berisi tentang program dan tujuan Ikhwan. Dalam risalah ini Hasan al-Banna membagi masyarakat ke dalam empat tipe manusia, yaitu

orang mukmin, orang yang ragu-ragu, orang yang oportunistis, dan orang yang memusuhi. Ia juga menjelaskan bahwa dakwah Ikhwan menyentuh semua sendi kehidupan. Artinya Islam adalah agama yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia (Mahmud 2000, 370).

- c) Risalah “Ke Mana Kami Membawa Umat (إلى أي شيء ندعو الناس)”, ditulis pada tahun 1936 M. Di dalamnya dibahas masalah agama, politik, dan nasionalisme secara jelas dan meyakinkan (Mahmud 2000, 377).
- d) Risalah “Menuju Cahaya” (نحو النور) ditulis tahun 1936 M, dan ditujukan kepada Raja Faruk, kepada kepala pemerintahan pada saat itu, Mustafa al-Nahas Pasha, dan seluruh raja, amir, dan penguasa di semua negara Islam. Di dalamnya Hasan al-Banna menekankan pentingnya membebaskan umat Islam dari segala bentuk ikatan politik yang membelenggunya, dengan menggunakan segala cara yang legal, dan dengan menerapkan sistem Islam. Dalam risalah ini pula Hasan al-Banna mencantumkan Indonesia sebagai salah satu negara yang harus mendapat perhatian oleh orang – orang Islam karena Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia yang masih berada dalam jajahan Belanda (Mahmud 2000, 380).
- e) Risalah “Untukmu Para Pemuda (إلى الشباب)”, ditulis juga pada tahun 1936 M. Di dalamnya Hasan al-Banna menjelaskan bentuk amal Islami yang hendak dilaksanakan para pemuda. Amal itu berupa pembentukan pribadi muslim, rumah tangga muslim, masyarakat muslim, pemerintah muslim, dan bangsa muslim dengan menyatukan seluruh negara Islam yang sudah dipecah belah akibat perbedaan politik. Al-Banna juga menjelaskan

bahwa keberhasilan suatu konsep ditentukan oleh empat faktor yakni keimanan, keikhlasan, semangat dan usaha (Mahmud 2000, 385).

- f) Risalah yang ditujukan kepada Konferensi Pelajar (هل نحن قوم عمليون), merupakan teks pidato yang disampaikan Hasan al-Banna pada bulan Muharram 1357 H /Maret 1938 M di hadapan para pelajar muslim. Di dalamnya al-Banna menyinggung masalah Islam dan politik, kebebasan berpendapat sebagai hal yang sangat penting dalam mencari kebenaran (Mahmud 2000, 391).
- g) Risalah “Ikhwanul Muslimin di Bawah Bendera Qur’an” (الاخوان تحت راية القرآن) Ini adalah pidato yang disampaikan Hasan al-Banna pada tanggal 14 Shafar 1358 H /4 April 1939 M, berisi ajakan untuk kembali kepada Islam yaitu menyandarkan segala sendi kehidupan pada al-Qur’an dan sunnah (Mahmud 2000, 394).
- h) Risalah “Antara Kemarin dan Hari Ini” (رسالة بين الامس واليوم), ditulis pada tahun 1942 M. Di dalamnya Hasan al-Banna membicarakan sistem pendidikan secara serius dan mendalam (Mahmud 2000, 396).
- i) Risalah “Pengarahan” (رسالة التعاليم), ditulis pada tahun 1943 M. Di dalamnya Hasan al-Banna mengungkapkan program pendidikan dan pembinaan jama’ah, serta target dan sarana pendidikan mereka (Mahmud 2000, 397).

Selain itu, karya-karya Hasan al-Banna yang lain yang menjadi aspirasi penerusnya adalah:

- 1) *Ahaditsul Jum’ah* (pesan setiap jumat),

- 2) *Al-Ma'tsurat* (wasiat-wasiat),
- 3) *Risalah al-Juhad* (pesan jihad),
- 4) *Al-Mu'tamar al-Khamis* (konfrensi kelima),
- 5) *Nizhamu al-Usar* (sistem kelompok kecil pergerakan),
- 6) *al-Nidzam al-Iqtishadi* (sistem perekonomian) (Mahmud 2000, 398).

b. Pendapat Hasan al-Banna tentang Multipartai dan Islam

1. Multipartai dan Islam dalam Politik Menurut Hasan al-Banna

Awal abad kedua puluh merupakan puncak dari penjajahan Dunia Barat terhadap negara-negara Islam atau yang penduduknya yang mayoritas muslim. Penjajahan yang dilakukan Dunia Barat tidak hanya mengambil harta yang ada di negara jajahan, lebih dari itu, para penjajah melakukan pengrusakan terhadap moral, budaya, ekonomi terlebih lagi terhadap agama (Furkon 2004, 55).

Untuk memahami pemikiran Hasan al-Banna tentang Islam kita mesti melihat, bahwa betapa dunia Barat merusak semua tatanan kehidupan masyarakat muslim di Mesir. Pada saat itu, Mesir sedang dijajah Inggris dan terjadi perlakuan yang tidak manusiawi, karena itu Inggris mesti hengkang dari Mesir. Namun yang jadi persoalan antara muslim reformis dengan kalangan nasionalis sekuler, mau dibawa kemana Mesir kemudian. Karena itu, Hasan al-Banna mengingatkan bahwa Mesir sedang berada dalam persimpangan jalan. Hanya ada dua pilihan yang harus diambil, mengikuti Barat atau mengikuti jalan Islam (al-Banna 1999, 66).

Menurut Hasan al-Banna Islam adalah anugrah Allah SWT yang benar-benar patut dihayati, dipahami dengan sepenuh hati. Islam adalah penghias hidup, perisi hidup, bahkan sebagai satu kekuatan dalam memantapkan jiwa dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak bisa dianggap barang murahan, sebagai kedok untuk mengambil banyak kemudahan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ahli

politik. Karena itu ia benar-benar menyediakan dirinya untuk menyerukan Islam ke seluruh dunia dengan segala konsekuensinya atau resikonya (Ya'cub 2000, 140-141).

Selanjutnya, Hasan al-Banna juga berpendapat bahwa Islam adalah suatu sistem kehidupan. Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap, yang tidak saja meliputi moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Oleh karenanya untuk pemulihan kejayaan dan kemakmuran, umat Islam harus kembali kepada kitab suci al-Quran dan Sunnah Nabi, mencontoh pola hidup Rasul dan umat Islam generasi pertama, tidak perlu bahkan jangan meniru pola atau sistem politik, ekonomi dan sosial Barat (Harun 2000, 55-56).

Lebih Lanjut Hasan al-Banna mengemukakan 20 prinsip yang dikenal dengan istilah *ushul al-isyirin*. Salah satu prinsip tersebut merupakan prinsip yang berkaitan dengan ke-universal-an Islam,

الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو دولة و وطن أو حكومة وامة ، وهو خلق و قوة أو رحمة و عدالة ، وهو ثقافة و قانون أو علم و قضاء، وهو مادة و ثروة أو كسب و غنى ، وهو جهاد و دعوة أو جيشى و فكرة، كما هو عقيدة صدقة و عبادة صحيحة ، سواء بسواء.

“Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan pemikiran, sebagaimana ia juga akidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih” (al-Qaradhawi 2007, 67).

Dari salah satu prinsip yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna tersebut, terlihat bahwa Islam merupakan agama yang *syaamil, kamil* dan *mutakammil* (menyeluruh, sempurna dan menyempurnakan). Ajarannya meliputi akidah, ibadah dan hukum. Islam juga mengatur

seluruh aspek kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan persoalan pribadi maupun yang berhubungan dengan masyarakat dan negara (al-Banna 1999, 67)

Lebih lanjut, keyakinan Imam Hasan al-Banna akan kesempurnaan ajaran Islam juga tergambar dari perkataan di bawah ini:

فحدثوني بربكم أيها الإخوان: إذا كان الإسلام شيئاً غير السياسة و غير الاجتماع ، و غير الثقافة ، فما هو إذن؟.. أهو هذه الركعات الخالية من القلب الحاضر ، أم هذه الألفاظ التي هي كما تقول رابعة العدوية: استغفار يحتاج إلى استغفار، ألهذا أيها الإخوان نزل القرآن نظاماً كاملاً محكماً مفصلاً" تبياناً لكل شيء و هدى و رحمة و بشرى لقوم المسلمين".

"Katakan padaku, demi Tuhan, wahai al-Ikhwan, jika Islam bukan sesuatu yang bersifat politik, sosial, bukan pula kebudayaan, lalu apa? Apakah ia beberapa rakaat sholat yang sepi dari kehadiran qalbu? Ataukah ia beberapa kalimat yang diucapkan, sebagaimana yang dikatakan Rabi'ah al-Adawiyah, "istighfar yang membutuhkan istighfar"? Apakah al-Quran diturunkan untuk ini, sebagai sistem yang integral, mengikat dan terperinci? Menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum Muslimin?" (al-Banna 1990, 30).

Melalui beberapa ceramahnya dapat diketahui bahwa Hasan al-Banna sangat memahami Islam sebagai agama yang universal yang mengatur segala segi kehidupan manusia. Ia juga secara tidak langsung membantah bahwa agama Islam sama dengan agama-agama yang lain. Baginya Islam bukan hanya mementingkan aspek spiritual semata, namun juga mementingkan aspek sosial (al-Banna 1999, 31).

Menurut Hasan al-Banna Islam diumpamakan dengan sebuah bangunan yang didirikan di atas empat pilar dan dilindungi oleh dua pagar besar. Berikut penjelasannya,

نحن معشر المسلمين نفهم إسلامنا على أنه هيكل مبني على دعائم أربع،
 ومحمى بسورين عظيمين : الدعامة الأولى : العقيدة الصافية التي تشعرنا
 بأنامعنا الله و آن مردنا إلى الله. الدعامة الثانية: العبادة الصحيحة والعمل
 الصالح، والقولى منه والفعلى، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر
 والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي. الدعامة الثالثة : و هي التي لا
 يكمل الإسلام إلا بها.. الواحدة، و اللأمة المجتمعة التي لاتفرقها الترععات
 السياسة ولا الذاهب الدينية . الدعامة الرابعة : التشريع العادل و القانون
 الصالح المستمد من كتاب الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم،
 لاالمستمد من الأهواء.

“Kami masyarakat muslim memahami bahwa Islam merupakan suatu bangunan yang didirikan di atas empat pilar dan dilindungi oleh dua pagar besar. Pilar tersebut adalah: Pilar pertama, adalah akidah yang murni yang membuat kita selalu bersama Allah, dan akan kembali kepada-Nya, pilar kedua, ibadah yang benar dan amal yang sholeh, baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti: sholat, puasa, haji, zikir, istighfar, tilawah, al-Quran dan sholawat kepada Nabi. Pilar ketiga, persatuan yang merupakan pilar di mana Islam tidak akan mungkin akan sempurna tanpanya. Umat yang bersatu dan tidak dipecah belah oleh berbagai kepentingan politik maupun aliran keagamaan. Pilar keempat, hukum yang adil dan undang-undang yang shahih, yang diambil dari al-Quran dan Sunnah Rasulullah, bukan dari nafsu” (al-Banna *Hadits al-Tsulatsa*, 472-473).

Mengenai pilar pertama yakni akidah yang murni, seorang muslim hendaklah selalu sadar akan kapasitasnya sebagai hamba Allah, sehingga ia akan terus berusaha agar segala aktifitas yang dilakukannya berada dalam koridor aturan Allah. Namun bagi seorang muslim akidah saja tidak cukup menyatakan bahwasannya dia seorang muslim. Untuk itu perlu dilaksanakan ibadah dan amal sholeh. Banyak ayat al-Quran yang mengaitkan antara keimanan dan amal ibadah, seperti firman Allah dalam surat al-Bayyinah ayat 7 yang berbunyi,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٥٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk” (Departemen Agama 1993, 532).

Mengenai pilar ketiga untuk menguatkan pendapatnya. Imam Hasan al-Banna mengemukakan sejumlah ayat al-Quran, di antaranya surat al-Mukminun ayat 52,

وَإِنَّ هَذِهِ ءَأُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

“Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku” (Departemen Agama, 1993:5).

Dari ayat tersebut terlihat bahwa Islam merupakan agama bagi seluruh manusia, dan ini dapat memberikan pemahaman bahwa hendaklah semua manusia bersatu padu dalam aturan dan pimpinan Islam dan menyembah Allah yang satu. Walaupun Islam menghendaki persatuan bagi seluruh umat, Islam tidak memaksakan semua manusia untuk memeluk agama Islam. Islam selalu memberikan kebebasan dan melindungi hak-hak individu dalam memilih keyakinan yang sesuai dengan dirinya (Candra 2005, 37-38).

Kemudian pilar keempat yakni hukum dan undang-undang yang benar, landasannya adalah firman Allah dalam surat al-Maidah:49-50,

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ



49. “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

50. “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (Departemen Agama, 1993:168-169),

Dari uraian di atas terlihat bahwa Islam merupakan agama yang tidak hanya berisi ajaran mengenai akidah saja, atau ibadah saja, akan tetapi melingkupi segala segi. Keempat pilar tersebut : akidah, ibadah, persatuan dan hukum, merupakan bagian yang terkait satu sama lain dan semakin membaut kompleks ajaran Islam (Candra 2005, 38).

Selanjutnya mengenai kedua pagar Islam, Imam Hasan al-Banna menyebutkan,

أما السوران: فالحكومة الإسلامية التي تقوم على حراسة الناس في دينهم وديارهم
وأما السور الثاني : فالجيش لحفظ استقلال الأمة و الدفاع عن حوزتها .

“Sedangkan kedua pagar Islam adalah: Pertama, pemerintahan Islam (*al-Hukumiyah al-Islamiyah*) yang mengatur dan mengawasi umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan agama maupun urusan dunia. Kedua, tentara yang sedang memelihara kemerdekaan umat serta membela harga dirinya.” (al-Banna 1990, 50).

Mengenai wacana multipartai dan Islam dalam politik, Hasan al-Banna mungungkan bahwa Islam dan politik ibarat dua sisi mata uang yang tak mungkin dipisahkan, karena itu jika ada orang yang berusaha untuk memisahkan keduanya akan sia-sia. Sebab Islam memiliki politik, yang

padanya terletak tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasan al-Banna berpendapat, "Jika ada yang menyangka bahwa agama tidak berkaitan dengan politik atau bahwa politik bukan bagian dari sasaran agama, berarti orang itu telah menzalimi dirinya sendiri, dan menzalimi keilmuannya terhadap Islam (Mohammad 2006, 203).

Uraian di atas dengan tegas ditanggapi oleh al-Banna dengan mengeluarkan statement pada sebuah konferensi pelajar Ikhwanul Muslimin 1357 yaitu: "Seorang Muslim tidak akan sempurna agamanya kecuali jika ia menjadi politikus, memiliki pandangan yang jauh tentang problematika umatnya, memperhatikan urusan-urusan mereka dan bersedia untuk membantu mencari jalan keluarnya (al-Banna 1999, 28).

Dalam pemikiran Hasan al-Banna politik terbagi dua pemahaman. *Pertama*, politik internal dan *kedua*, politik eksternal. Dan keduanya tidak terikat dalam *hizbiyah* (kepartaian). Adapun yang dimaksud dengan politik internal adalah bagaimana pemerintahan menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar serta transparan. Menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan dan memberikan kesempatan pada setiap unsur masyarakat untuk mengontrolnya sehingga tercipta suatu *check and balances*. Dalam hal mengatur pemerintahan seperti ini Islam telah menetapkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsipnya, bahkan dalam konteks zalim menzalimi Islam telah memberikan batasan yang tidak boleh dilanggar dan dilampaui (al-Banna 1999, 68-69).

Islam telah menggariskan dan menegaskan adanya kepemimpinan umat serta mewasiatkan agar setiap muslim mampu menjadi manajer dengan kesempurnaan manajerialnya dalam memantau jalannya roda pemerintahan, memberikan nasihat, kontribusi, dan selalu kritis terhadap hasil perhitungan. Islam telah mewajibkan kepada petinggi pemerintahan agar berbuat bagi kemaslahatan rakyat dalam rangka memapankan yang haq dan membasmi yang batil, maka ia juga mewajibkan kepada rakyat agar mendengar dan taat kepada pemimpin. Jika pemimpin itu dijumpai

melakukan penyimpangan, maka wajib bagi mereka untuk meluruskannya sesuai dengan kebenaran yang ada, memberlakukan hukum yang berlaku dan mengembalikannya kepada kerangka keadilan. Ajaran ini semua bersandar pada kitab Allah dan hadits-hadits Rasulullah SAW (al-Banna 1999, 69).

Adapun politik eksternal, dalam konteks bagaimana membangun peradaban dan harga diri umat. Di antaranya bagaimana menjaga kebebasan dan kemerdekaan umat, menanamkan rasa percaya diri, kewibawaan dan meniti jalan menuju tempat yang mulia. Jika yang diinginkan kewibawaan umat, maka konsekuensinya umat harus terbebas dari segala macam penjajahan, agar dapat berdiri sama tinggi dengan negara bangsa-bangsa lain demi terwujudnya perdamaian internasional. Kalau konteks politik eksternal, Islam memang sudah mempunyai perhatian yang serius agar umatnya memperhatikan masalah hubungan internasional dan menjaga perdamaian. Barang siapa yang mengabaikannya, berarti mereka tak memahami ajaran Islam atau bahkan telah murtad (al-Banna 1999, 72-73).

Lebih jauh Hasan al-Banna menegaskan bahwa dasar pijakan politik Islam adalah sistem *syura*. Dalam politik posisi *syura* merupakan sesuatu yang sangat penting, karena merupakan landasan untuk mengambil sebuah keputusan (al-Banna 1999, 68-72).

Dalam kehidupan politik, keberadaan partai politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, terutama di negara-negara demokrasi. Karena partai politik merupakan tempat yang di mana orang biasa mengekspresikan pendapatnya adalah melalui partai politik. Meski demikian, tak selamanya seorang politisi harus masuk dalam partai politik, sebaliknya orang yang berada dalam partai politik belum tentu mengerti politik (al-Banna 1999, 73).

Pemahaman seperti di atas merupakan bagian dari pemikiran Hasan al-Banna. Baginya politik tak selamanya harus identik dengan partai politik.

Adapun alasannya menurut Hasan al-Banna antara kepartaian dan politik keduanya bisa bersatu dan berbeda sama sekali. Hasan al-Banna mencontohkan, seorang politisi tidak mesti langsung dalam struktural partai politik. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang secara struktural masuk dalam kepengurusan partai belum tentu dia mengerti dengan apa namanya politik. Dan ada juga orang yang memang mengerti politik dan terlibat secara intensif dengan partai politik (al-Banna, 1999:65). Lebih lanjut penulis ingin mengutip dua hal penting yang ditekankan oleh Hasan al-Banna,

أولهما : أن الفارق بعيد بين الحزبية و السياسة ، و قد يجتمعان و قد يفترقان ،
فقد يكون الرجل سياسة بكل ما في الكلمة من معان و هو لا يتصل بحزب
ولا يمت إليه ، و قد يكون جزيا و لا يدري من امر السياسة شيئا،وقد يجمع
بينهما فيكون سياسيا جزيا أو جزيا سياسيا على حد سواء...
والثاني : أن غير المسلمين حينما جهلوا هذا الإسلام ، أو حينما إعياهم أمره
وثباته في نفوس أتباعه ، و رسوخه في قلوب المؤمنين به، و استعداد كل مسلم
لتفديته بالنفس و المال ، لم يحاولوا في نفوس المسلمين اسم الإسلام ولا
مظاهر وشكلياته، و لكنهم حولوا أن يحصروا معناه في دائرة ضيقة تذهب بكل
ما فيه من نواه قوية عملية ،

Pertama, Sesungguhnya ada perbedaan yang mendasar antara kepartaian dan politik. Keduanya mungkin bisa bersatu dan mungkin juga berseteru. Mungkin seseorang disebut politisi dengan segala makna politik yang terkandung di dalamnya, namun ia tidak berinteraksi dengan partai atau bahkan tidak ada kecendrungan ke sana. Mungkin pula ada orang yang berpolitik praktis (terjun dalam kepartaian) namun ia sama sekali tidak mengerti masalah politik. Atau mungkin ada pula orang yang menggabungkan antara keduanya sehingga ia adalah politisi yang berpolitik praktis atau berpolitik praktis yang politisi pada proporsi yang sama (al-Banna 1999, 65).

Kedua, Sesungguhnya orang-orang nonmuslim, ketika mereka awam tentang Islam atau dibuat pusing oleh urusan dan kokohnya Islam yang menancap di dalam jiwa para pengikutnya, atau kesiapan berkorban

dengan harta dan jiwa demi tegaknya Islam, maka mereka tidak berusaha untuk melukai jiwa-jiwa kaum muslimin dengan menodai nama Islam, syariat dan undang-undangnya. Namun mereka berusaha membatasi substansi makna Islam pada lingkup sempit yang menghilangkan semua sisi kekuatan operasional yang ada di dalamnya (al-Banna 1999, 65-66).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa multipartai pasti identik dengan politik, tetapi politik tidak mesti identik dengan kepartaian, ini menunjukkan bahwa antara politik dengan kepartaian memang terdapat perbedaan. Namun walaupun ada beberapa perbedaan, keduanya dapat bersatu dalam diri seseorang. Mengenai perbedaan mungkin akan lebih jelas dengan mengaitkannya pada apa yang ditemui sekarang ini. Seseorang dapat disebut sebagai seorang politisi, dimana ia memahami apa itu politik dan kegiatan-kegiatan politik atau ia mendalami politik secara teoritis namun ia tidak berinteraksi dengan partai politik yang ada. Dalam kategori ini bisa disebutkan, seperti Din Syamsuddin dan lain sebagainya. kemudian ada pula orang yang berpolitik praktis, dengan kata lain terjun ke dalam kancah politik dengan masuk pada salah satu partai politik yang ada, namun sebenarnya secara teoritis ia tidak paham dengan politik, seperti kebanyakan anggota-anggota partai yang ada saat ini. Selanjutnya ada pula orang yang secara teoritis matang mengenai perpolitikan, dan ia mengimbangi pengetahuannya dengan aktif bergerak dalam salah satu partai politik yang berkembang seperti Amien Rais yang matang dalam politik secara teoritis, yang dibuktikan dengan S3-nya dalam bidang politik serta beberapa karya ilmiahnya dalam bidang yang sama, di samping itu ia juga aktif di kepengurusan partai sebagai ketua.

Islam dan politik adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sebab Islam memiliki politik yang padanya terletak tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam adalah suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi moral dan peribadatan tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi dan sosial.

2. Pendapat Hasan al-Banna tentang Penerapan Sistem multipartai dalam Suatu Negara

Pendapat Hasan al-Banna tentang penerapan sistem multipartai dalam suatu negara dipengaruhi oleh kondisi wilayah semasa al-Banna hidup. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Hasan al-Banna adalah seorang tokoh politik yang hidup di zaman dimana wilayah kelahirannya didominasi oleh keberadaan bangsa asing yaitu Inggris. Sistem politik yang berkembang saat itu pun sistem politik asing, yang jauh dari kancah perpolitikan Islam. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pemikiran Hasan al-Banna. pemikiran Imam al-Banna dan dakwahnya adalah Islam. tidak ada unsur selain Islam, dan tidak mencampuradukkan Islam dengan unsur lain (Mohammad 2006, 203).

Pendapat Hasan al-Banna terhadap penerapan sistem multipartai disikapi dengan dua konsep, diantaranya:

- 1) Kehadiran sistem multipartai dinilai positif sebagai wujud dakwah untuk kemaslahatan bersama,
- 2) Kehadiran sistem multipartai dinilai negatif dalam pemahaman kesesuaian sistem dengan kondisi politik wilayah (al-Banna 1999, 79).

Hal di atas menjelaskan bahwa Hasan al-Banna tidak mengharam berlakunya sistem multipartai dalam suatu negara jika tujuan dibentuknya partai politik tersebut adalah untuk kemaslahatan bersama dan tentunya partai yang berpedoman kepada Islam/partai Islam. Dan Hasan al-Banna melarang atau tidak menerima diberlakukannya sistem multipartai di negara-negara yang belum nyata kemerdekaannya atau masih dijajah oleh bangsa asing. Artinya, Hasan al-Banna menyetujui adanya sistem multipartai di negara yang sudah merdeka sebagai wujud untuk menyalurkan aspirasinya rakyat secara keseluruhan. Hasan al-Banna mengungkapkan “bahwa Mesir adalah bangsa yang belum sempurna kemerdekaannya. Bangsa Mesir masih dalam kebimbangan.

Maka yang diperlukan di sini adalah persatuan dan kesatuan. Jika sebuah bangsa yang telah sempurna kemerdekaannya dan telah menemukan jati dirinya, diperkenankan untuk berada dan membentuk kelompok (partai-partai) dalam masalah-masalah yang bukan esensial, maka hal serupa itu tidak dapat berlaku di negara yang baru tumbuh (al-Banna 1999, 80).

Akan tetapi di dalam salah satu karyanya Hasan al-Banna mengungkapkan “bahwa partai politik, jika pun sesuai untuk sebagian kondisi dan sebagian negara, maka belum tentu sesuai untuk keseluruhannya. Dan partai politik selamanya tidak sesuai untuk negara Mesir, khususnya pada dekade ini (al-Banna 1999, 79).

Di masa Hasan al-Banna hidup sistem multipartai yang ada di Mesir saat itu masih jauh dari kriteria multipartai. Dimana partai politik didirikan secara khusus atas dorongan ambisi pribadi tidak didasari kemaslahatan umum, akan tetapi bagaimana mendapatkan kedudukan dan kekuasaan dan sistem multipartai di Mesir pun berkiblat kepada Inggris (al-Banna, 1999, 81).

Partai-partai politik di Mesir sekarang ini lebih sebagai partai politik karbitan ketimbang sungguhan. Yang mendorong kemunculannya itu bersifat inisiatif perorangan daripada kepentingan nasional. Tugas serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan partai-partai itu kini sudah tidak ada lagi. Maka sistem ini seharusnya juga tidak berlaku, karena tidak adanya tugas dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya (al-Banna 1999, 81).

Partai Wafd dibentuk oleh rakyat untuk menuntut kemerdekaan dengan jalan negoisasi. Dan itulah tugasnya. Kemudian dari partai itu berdirilah Partai *Ahrar ad-Dusturiyin* karena adanya perbedaan dalam cara dan gaya negoisasi. Negoisasi dengan cara, sistem dan kaidah-kaidahnya itu kini tela usai. Maka tugasnya pun semestinya telah selesai (al-Banna 1999, 81).

Partai Rakyat (*Hizbushy Sya'b*) terbentuk karena adanya aturan dan undang-undang khusus. Undang-undang sebagai aturan dengan segala bentuk dan situasinya itu kini telah usai. Maka misi pendirian partai itu pun berarti telah selesai. Berdirinya Partai Persatuan (*Hizbul Ittihaad*) dikarenakan adanya sikap dan kondisi khusus yang menyangkut pertikaian antar golongan dan partai. Kondisi-kondisi seperti ini semuanya telah usai dan berkembanglah situasi-situasi baru yang menuntut adanya manhaj (sistem) dan kerja untuk merealisasikannya. Jadi, adanya partai-partai ini sama sekali tidak punya arti. Tidak ada gunanya kembali ke masa lalu, sementara masa depan sangat mendesak untuk segera bramal dan meniti jalan dengan langkah secepat mungkin (al-Banna 1999, 81).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pendapat Hasan al-Banna tentang penerapan sistem multipartai dalam suatu negara penulis dapat menyimpulkan bahwa Hasan al-Banna tidak mengharamkan berlakunya sistem multipartai di suatu negara dengan syarat sesuai dengan syari'at Islam dan dengan tujuan untuk kemaslahatan umum, namun Hasan al-Banna tidak menerima diberlakukannya sistem multipartai di negara yang masih dalam masa transisi atau belum merdeka, ketidaksetujuan Hasan al-Banna terhadap pemberlakuan sistem multipartai dalam suatu negara berhubungan dengan kondisi Mesir saat itu, yang mana Mesir masih berada di bawah jajahan Inggris.

3. Alasan Hasan al-Banna Menolak Penerapan Sistem Multipartai dalam Suatu Negara

Hasan al-Banna adalah salah satu tokoh pergerakan Islam yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di Mesir pada abad ke-20. Kembali kepada ajaran Islam murni dan sistem khilafah lah diinginkan Hasan al-Banna. Hidup di zaman Mesir dijajah oleh Inggris membuka pemikiran Hasan al-Banna untuk membuat Mesir merdeka dari Inggris. Ketidaksetujuannya terhadap sistem politik yang diterapkan Inggris,

membuat ia ingin merubah bahkan ingin menghapus sistem politik yang berkiblat ke Inggris tersebut. Hasan al-Banna adalah tokoh pergerakan yang tidak menyetujui diberlakukannya sistem multipartai di dalam suatu negara, khususnya negara yang belum merdeka atau yang masih dijajah oleh bangsa asing (al-Banna 1999, 80).

Penolakan Hasan al-Banna terhadap pemberlakuan sistem multipartai dipengaruhi oleh zaman ia hidup, di mana di kala itu Mesir masih berada dalam jajahan Inggris. Dan sistem politik yang diterapkan pada waktu itu jauh dari prinsip Islam. Selain itu, Hasan al-Banna pada masa itu menemukan kelemahan dari diberlakukannya sistem multipartai tersebut:

- 1) Ideologi partai politik pada masanya tidak dilandasi pada pemahaman al-Quran dan Sunnah, kinerja partai dengan tujuan kekuasaan dan telah memecah belahkan sesama umat Islam hanya dengan perbedaan kepentingan dari setiap kelompok (Ghazali 2001, 34),
- 2) Sistem parlementer dengan kehadiran satu atau dua partai yang berada di bawah kontrol penguasa menjadi solusi terhadap kondisi yang dinilai baru merdeka dari pengaruh Inggris (Ghazali 2001, 34).

Sebagai Negara yang masih berada di bawah pengaruh Inggris, Hasan al-Banna menginginkan Mesir bersatu, tidak bercerai-berai, menurutnya sistem multipartai yang diterapkan masa itu hanya memecah belah umat, saling menjatuhkan satu sama lain, dan tidak ada partai yang memikirkan kemaslahatan umat, semuanya hanya memikirkan bagaimana menduduki kursi kekuasaan atau kemenangan dalam pemilu (Ghazali 2001,35).

Terkait dengan kesatuan umat, al-Banna menjelaskan bahwa Islam dengan tegas telah mewajibkan dan menjadikannya sebagai bagian yang esensial dalam kehidupan masyarakat Islam, dalam keadaan apapun. Karena, Islam menganggap kesatuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman, sebagaimana Islam menganggap bahwa perpecahan adalah

bagian tak terpisahkan dari kekafiran, sebagaimana firman Allah Swt, dalam QS. AL-Hujurat:10 (al-Banna 1998, 308),

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Firman Allah Swt, dalam QS. Ali-Imran:100,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.”

Artinya, setelah kalian bersatu kemudian bercerai-berai. Rasulullah saw. bersabda,

حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا تراجعوا بعدي كفارا يضرب بعضهم وجوه بعض... (رواه ابن ماجة)

“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Ali bin Mudrik dari Abu Zur’ah bin ‘Amru dari Jarir, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya saat beliau diminta untuk memberi nasihat kepada orang-orang waktu haji wada’ “Janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelahku, (yang mana) sebagian kalian menampar wajah sebagian yang lain” (HR. Ibnu Majah) (Shahih Bukhari, 114).

Di sini, Rasulullah mengungkap kalimat kekafiran sebagai pengganti perpecahan, bercerai-berai, dan saling menampar wajah antara sebagian

yang satu dengan yang lainnya. Hasan al-Banna berpendapat bahwa sistem perwakilan, baik yang parlementer maupun presidensial tidak menolak prinsip kesatuan ini. Apalagi jika warna kehidupan sosial itu satu dalam prinsip dan orientasi globalnya, sebagaimana kondisi umat Islam secara keseluruhan pada hari-hari ini. Sesungguhnya, berbagai fanatisme partai, perpecahan, dan perbedaan pendapat yang senantiasa menyelimuti sistem parlemen di Eropa dan yang lainnya itu dikarenakan ia memang tumbuh dalam situasi berantakan. Konflik-konflik berdarah yang berkepanjangan antara rakyat dengan penguasa merupakan sebab utama munculnya warna sistem parlemen seperti itu, ditambah dengan kecendrungan dan keragaman pendapat. Sedangkan umat Islam, Allah telah menjaga dari semuanya itu, memelihara mereka dengan kesatuan dan toleransi, serta dari perpecahan dan kekacauan (al-Banna 1998, 309).

Meski demikian, sistem parlemen di tempat kelahiran pendukungnya pun tidak tertumpu kepada asas multipartai. Di Inggris misalnya, cuma ada dua partai. Keduanyalah yang saling bergantian dalam memimpin negara. Bahkan, orientasi kepartaiannya "*internal minded*" dan selalu dipersatukan oleh masalah-masalah nasionalisme yang penting. Sehingga, keragaman partai sama sekali tidak berpengaruh (al-Banna 1998, 309).

Begitu juga di Amerika, di sana hanya ada dua partai, yang tidak terdengar gaungnya kecuali pada musim pemilu. Adapun di luar keduanya itu, maka tidak ada kepartaian. Sedangkan negara-negara yang berkembang dalam iklim kepartaian dan selalu berambisi untuk membentuk partai baru, ia mengalami suasana perang dan damai yang datang silih berganti. Negara Perancis contohnya. Jika demikian halnya, al-Banna berpendapat bahwa kesatuan bangsa adalah asas bagi sistem sosial Islam dan ini tidak dipermasalahkan oleh sistem parlemen, dan kesatuan Mesir harus ditegakkan secepatnya, mengingat setelah partai-partai yang ada menghancurkan segala-galanya di Mesir (al-Banna 1998, 309-310).

Hasan al-Banna mengungkapkan bahwa partai-partai di Mesir adalah bagian dari masa kelam negeri Mesir. Partai di Mesir kala itu adalah akar kerusakan sosial yang baranya kini masih menyala. Pada hakikatnya ia bukanlah partai sebagaimana yang dikenal oleh berbagai negara di dunia. Ia tidak lebih dari sekedar rentetan konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat individual di tengah umat, yang pada suatu ketika mereka terkondisi untuk berbicara atas namanya dan menuntut hak-haknya dengan atas nama nasionalisme (al-Banna 1998, 310).

Masing-masing partai itu sesungguhnya tidak mempunyai program dan sistem yang istimewa untuk ditawarkan. Tidak ada perbedaan sama sekali antara mereka kecuali sebatas nama-nama tokohnya. Hal ini jelas sekali terlihat dari berbagai keterangan pers di luar pemerintahan dan juga dari telaah terhadap ceramah-ceramah resmi di dalam pemerintahan (al-Banna 1998, 310).

Karena partai-partai itu dipersembahkan oleh tokoh-tokoh dan para wakil rakyat dan mereka pula lah yang mengendalikan sisi luar pemerintahan dalam kehidupan parlemen, maka wajar jika urusan pemerintahan tidak berjalan normal. Inilah kondisi riil dari sistem yang hanya mengendalikan sisi luarnya saja (al-Banna 1998, 310).

Hal ini sesuai dengan ungkapan salah seorang pakar dalam hukum perundang-undangan, al-Ustadz Sayyid Shabri dalam bukunya yang berjudul *Mabadi' al-Qaanun ad-Dustury*, yang mana ketika berbicara tentang partai-partai di Mesir beliau berkata, "Kenyataannya sebagian besar partai di Mesir tidak mempunyai program kerja yang diperjuangkan para pendukungnya. Bahkan, sebuah partai identik dengan sosok seorang menteri terdahulu yang mempunyai pendukung dan kader. Akibat terpenting dari kondisi ini adalah, pemilu yang diselenggarakan tidak berjalan di atas kompetisi program kerja dengan slogan "satu untuk semua", namun hanya berdasar kepercayaan kepada seorang tokoh atau kompetisi antar mereka saja. Sehingga, pemilu itu lebih bersifat individual dan dan

bukan kepartaian sebagaimana pemahaman masyarakat Barat. Suatu hal yang wajar jika keberadaan partai-partai seperti itu memecah-belah negara ke dalam golongan-golongan dan kelompok-kelompok, serta menebarkan konflik dan perpecahan antara individu dan keluarga tanpa sebab yang bisa dipahami atau alasan yang masuk akal“(al-Banna 1998, 310-311).

Selanjutnya, Hasan al-Banna berkeyakinan bahwa partai-partai politik yang ada di Mesir didirikan dalam suasana yang tidak kondusif. Sebagian besar didorong oleh ambisi pribadi, bukan demi kemaslahatan umum. Al-Banna juga berkeyakinan bahwa partai-partai yang ada, hingga kini belum dapat menentukan program dan *manhajnya* secara pasti. Semua mengaku berjuang demi kemaslahatan umat dalam segala aspeknya. Akan tetapi, semua itu jauh dari yang diharapkan (al-Banna 1998, 260).

Hasan al-Banna juga berkeyakinan bahwa *hizbiyah* (sistem kepartaian) seperti ini akan merusak seluruh tatanan kehidupan, memberangus kemasalahatan, merusak akhlak, dan memporak-porandakan kesatuan umat. Dalam kehidupan baik yang bernuansa khusus maupun umum, sistem kepartaian semacam ini hanya melahirkan dampak negative (al-Banna 1998, 260).

Hasan al-Banna juga berkeyakinan bahwa sistem perwakilan atau bahkan parlemen itu tidak membutuhkan sistem kepartaian dengan bentuknya seperti yang ada di Mesir sekarang. Jika tetap dengan bentuk yang ada sekarang, maka tidak mungkin akan berdiri pemerintahan koalisi dalam sebuah negara yang demokratis. Argumentasi yang mengatakan bahwa sistem parlemen tidak mungkin eksis kecuali harus ada partai-partai politik adalah argumentasi yang lemah. Banyak negara yang menggunakan Demokrasi Parlementer bisa berjalan dengan sistem partai tunggal (al-Banna 1998, 260).

Sebagaimana Hasan al-Banna juga berkeyakinan bahwa ada perbedaan prinsip antara kebebasan, musyawarah, dan nasehat, sebagaimana yang digariskan oleh Islam. dengan fanatisme terhadap

pendapat, keluar dari lingkaran jamah, berusaha terus-menerus untuk memperluas jurang perpecahan di kalangan umat dan menggoncang kekuasaan pemerintahan yang resmi. Itulah konsekuensi logis yang ditimbulkan oleh *hizbiyah* dan ditolak oleh Islam bahkan diharamkan. Islam dalam semua syariatnya selalu menyerukan untuk bersatu dan bekerja sama (al-Banna 1998, 260-261).

Alasan lain Hasan al-Banna menolak penerapan sistem multipartai di suatu negara adalah ia berpendapat bahwa Islam tidak merekomendasikan kepartaian, Islam merupakan *dienul wihbah* dalam segala hal, Islam adalah agama kelapangan dada, kejernihan hati, ukhwah yang shahih dan kerja sama yang jujur antara seluruh lapisan masyarakat, apalagi sesama umat mukmin. Sesungguhnya bangsa yang bersatu sama sekali tidak akan merekomendasi, tidak merelakan, dan tidak menyetujui adanya sistem kepartaian, sebagaimana firman Allah Swt, dalam QS. ali-Imran:103 (al-Banna 1999, 81-82),

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ
 شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Hasan al-Banna juga menjelaskan di dalam bukunya, bahwa salah satu karakteristik dakwah ikhwan itu adalah menjauhi partai-partai dan

golongan-golongan. Perihal menjauhi partai-partai dan golongan-golongan, hal ini dikarenakan banyaknya pertentangan dan saling merendahkan antara golongan yang ada, yang itu sama sekali tidak sesuai dengan ukhuwah islamiyah. Dakwah islamiyah itu sifatnya umum, semua manusia. Dakwah ini bertujuan untuk menyatukan bukan memecah-belah (al-Banna 1998, 231).

Semua konsekuensi logis yang diakibatkan oleh sistem kepartaian, seperti perpecahan, pemutusan hubungan, perselisihan, dan permusuhan, semua itu sangat dibenci oleh Islam. Hal tersebut di atas merupakan kesimpulan dari pandangan Hasan al-Banna terhadap partai dan sistem kepartaian yang ada di Mesir. Dan kondisi tersebut menjadi alasan kenapa al-Banna menolak penerapan sistem multipartai di suatu negara. Khususnya negara Mesir (al-Banna 1998, 232).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai alasan Hasan al-Banna menolak penerapan sistem multipartai dalam suatu negara penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan Hasan al-Banna menolak sistem multipartai ini berkaitan erat dengan kondisi Mesir saat itu, yang mana Mesir berada di bawah penjajahan negara Inggris, dan menurut Hasan al-Banna persatuan lah yang dibutuhkan saat itu, sedangkan sistem multipartai yang diterapkan saat itu justru memecah-belah dan membuat rakyat Mesir bercerai-berai.

4. Implikasi Penerapan Sistem Multipartai Terhadap Politik Islam Menurut Hasan al-Banna

Dunia Islam mengenal sosok al-Banna sebagai mujahid dakwah dan pembangkit umat Islam. al-Banna dikenal sebagai sosok penggerak “revolusi” kebangkitan perjuangan umat Islam internasional. Dalam politik Islam, al-Banna mendambakan pemerintahan yang bercorakkan Islam, yang jauh dari westernisasi (al-Banna 1998, 5).

Dalam dakwahnya pun, Hasan al-Banna juga menyerukan untuk berdakwah dengan dakwah Allah Swt., yang merupakan dakwah yang

paling mulia. Yang mengajak manusia untuk memegang pemikiran Islam, yang merupakan pemikiran yang paling lurus. Mengajukan syari'at al-Quran kepada manusia, yang merupakan syari'at yang paling adil (Mohammad 2006, 203).

Dalam politik Islam, pemerintahan yang bercorakkan Islam adalah dambaan Hasan al-Banna, pemerintahan yang tegak di atas kaidah sistem sosial yang telah digaris Allah untuk umat manusia. Allah tidak menghendaki terjadinya kekacauan dan tidak membiarkan umat Islam hidup tanpa pemimpin. Rasulullah saw. bersabda kepada sebagian sahabatnya,

إذا نزلت ببلد و ليس فيه سلطان فارحل عنه. (رواه مسلم)

“ika engkau berada di sebuah negeri yang tidak ada kepemimpinan di dalamnya, maka tinggalkan negeri itu” (al-Banna 1998, 297).

Pada hadits yang lain beliau juga bersabda kepada para sahabat,

حدثنا حبيب بن حسان, عن زيد بن وهب, قال: سمعت عمر بن الخطاب, يقول: " وإذا كنتم ثلاثة في سفر, فأمروا عليكم أحدكم, ... (رواه ابوداود)

“Telah menceritakan kepada kami Habib ibn Hasan, dari Zaid ibn Wahab, berkata: saya mendengar Umar ibn Khattab, bahwasannya Rasulullah berkata: “dan jika kalian bertiga dalam perjalanan, maka hendaklah salah seorang (di antara kalian) memimpin” (HR. Abu Dawud) (al-Banna 1998, 298).

Jika ada seseorang beranggapan bahwa agama terlebih lagi Islam tidak mengungkap masalah politik atau bahwa politik tidak termasuk dalam agenda pembahasannya, maka sungguh orang tersebut telah menganiaya diri sendiri dan pengetahuannya. Sebagaimana ungkapan Imam al-Ghazali, “Ketahuilah bahwa syari'at itu pondasi, dan raja itu penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya pasti akan hancur, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya niscaya akan hilang” (al-Banna 1998, 298).

Daulah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas pondasi dakwah, sehingga ia menjadi sebuah pemerintahan yang menghasung suatu misi, bukan sekedar bagan struktur, dan bukan pula pemerintahan yang materialistis, yang gersang tanpa ruh di dalamnya. Demikian pula dakwah tidak mungkin tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan yang akan menjaga, menyebarkan, dan mengokohkannya (al-Banna 1998, 298).

Merupakan kesalahan fatal jika pemikiran tersebut di atas dilupakan, sehingga dalam prakteknya sekarang orang-orang sering memisahkan agama dari urusan politik. Mereka tetapkan dalam UUD bahwa agama resmi negara adalah Islam, namun ternyata ketetapan ini tidak cukup bisa menghalangi para petinggi pemerintahan dan para tokoh politik untuk merusak citra Islam dalam persepsi dan pikiran khalayak, serta merusak keindahan Islam dalam realitas kehidupan. Hal ini mereka lakukan dengan keyakinan dan kesadaran penuh untuk menjauhkan pesan-pesan agama dari kancah politik. Inilah awal dari persangkaan yang keliru dan ini pulalah pangkal kerusakan (al-Banna 1998, 298).

Menurut Hasan al-Banna, dalam politik Islam, pemerintah Islam atau Daulah Islamiyah mempunyai beberapa tiang-tiang penyangga, yaitu:

1) Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintah adalah pelayan dan pekerja, sedangkan rakyat adalah tuannya, Rasulullah saw. pernah bersabda.

عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم, كلکم راع و
كلکم مسؤل عن رعیتہ ... (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra, Nabi SAW. bersabda: “Setiap kalian adalah penggembala (pemimpin) dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang digembalakan (yang dipimpin)”(HR. Bukhari dan Muslim) (al-Banna 1998, 298-299).

Ketika Abu Bakar ra. diangkat menjadi khalifah, beliau naik ke atas mimbar seraya berkata, “Wahai sekalian manusia, aku dulu bekerja untuk keluargaku. Akulah yang menghasilkan makan buat mereka. Namun, kini aku bekerja untuk kalian, maka bayarlah aku dari Baitul Mal kalian” (al-Banna 1998, 299).

Dengan penjelasan ini, beliau memberikan penafsiran terhadap hubungan sosial antara pemerintah dengan rakyatnya. Bahkan, beliau telah meletakkan dasar-dasarnya, bahwa masing-masing pihak harus menjaga hak dan kewajibannya serta memelihara kepentingan bersama. Jika dia baik dalam melakukan tugasnya, maka baginya pahala. Namun jika sebaliknya, maka baginya sudah ditetapkan sanksi hukuman (al-Banna1998, 299).

2) Kesatuan Umat

Umat Islam adalah umat yang satu, karena ukhwah yang dengannya Islam telah mempersatukan hati mereka, mereka adalah salah satu landasan iman. Tidak ada kesempurnaan iman kecuali dengan ukhwah, dan tidak akan terealisasi iman kecuali dengan menegakkannya. Namun hal itu tidak berarti menghalangi kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan nasehat dari yang kecil kepada yang besar, atau dari yang besar kepada yang kecil. Hal inilah yang merupakan tradisi Islam, yakni memberi nasehat, amar ma’ruf dan nahi munkar. Rasulullah saw. bersabda,

عن تميم الداري, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم." (رواه مسلم)

Dari Tamim Dariyi berkata: bahwasannya Rasulullah SAW berkata: “Agama itu nasehat. “Mereka berkata, “Bagi siapa wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Bagi Allah, Rasul-Nya, kitab-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan kalangan umum mereka” (HR. Muslim) (al-Banna 1998, 299).

Rasulullah juga bersabda,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم لم فقد تودع منها.

“Rasulullah SAW bersabda, “Jika aku melihat umatku takut berkata kepada orang yang berbuat zhalim (dengan perkataan), ‘Wahai si Zhalim’, maka ia telah keluar dari kelompok mereka” (al-Banna 1998, 300).

Para riwayat beliau bersabda,

عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:..., وبطان الأرض خير لهم من ظهرها.

Dari Abu Hurairah, berkata: bahwasannya Rasulullah SAW berkata: “Dan perut bumi lebih baik bagi mereka daripada permukaannya” (al-Banna 1998, 300).

Di kalangan umat Islam tidak terdapat perbedaan dalam persoalan-persoalan prinsip antara satu dengan yang lain, karena sistem sosial yang mereka yakini adalah satu, yakni al-Islam yang telah dikenal luas oleh mereka. Sementara itu, perbedaan dalam hal-hal *furu'* (cabang) tidaklah membahayakan, tidak akan mengakibatkan kebencian, permusuhan dan fanatisme golongan (al-Banna 1998, 300).

3) Menghargai Aspirasi Rakyat

Di antara hak umat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintahan dengan secermat-cermatnya dan menasehatinya jika dirasa hal itu membawa kebaikan. Sedangkan pemerintah hendaknya bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dan mengambil yang baik dari masukan-masukannya. Allah swt. telah memerintahkan kepada para kepala pemerintahan agar melakukan hal itu, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. asy-Syura:38 (al-Banna 1998, 300-301),

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

Masalah ini juga ditegaskan dalam sebuah Sunah Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءهم أمر جمعوا أهل الرأي من المسلمين واستشاروهم و نزلوا عند الصواب من أرائهم ، بل إنهم ليندبوهم إلى ذلك و يحثوهم عليه

“Rasulullah SAW bersabda :“Jika datang kepada mereka suatu masalah, mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin. Kemudian mereka saling bermusyawarah dan mengambil yang benar dari rangkaian pendapat mereka. Bahkan, para ahli tadi mengajak dan menganjurkan kaum muslimin untuk (berpegang) kepada pendapat yang benar tadi” (Banna 1998, 301).

Sistem Islam bukanlah slogan dan julukan semata, selama kaidah-kaidah pokok di atas tadi bisa diwujudkan (di mana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan diterapkan secara tepat hingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang masing-masing bagian tidak mendominasi bagian yang lain). Keseimbangan ini tidak mungkin bisa terpelihara tanpa adanya nurani yang selalu terjaga dan perasaan yang tulus akan kesakralan ajaran ini. Dengan memelihara dan menjaganya akan tergapailah keberuntungan di dunia dan keselamatan di akhirat (al-Banna 1998, 301).

Inilah yang dalam istilah politik modern dikenal sebagai kesadaran politik, atau kematangan politik, atau pendidikan politik

atau istilah-istilah sejenis yang semua itu bermuara pada satu hakikat: keyakinan akan kelayakan sistem dan rasa kepedulian untuk menjaganya. Teks-teks ajaran saja tidaklah cukup untuk membangkitkan umat. Demikian juga, sebuah undang-undang tak akan berguna jika tidak ada seorang hakim yang adil dan bersih yang memelopori penerapannya (al-Banna 1998, 301).

Hasan al-Banna berpendapat, bahwa implikasi atau akibat dari penerapan sistem multipartai dalam suatu negara sangat berdampak ke politik Islam/Daulah Islamiyah, selain merusak persatuan dan kesatuan bangsa, juga membuat pemerintahan menjadi kacau (al-Banna 1998, 302).

Sebagaimana yang diungkapkan Yusuf al-Qaradhawi, yang mana ia mengkritisi pendapat Hasan al-Banna, yang mana Hasan al-Banna di sini menolak pemberlakuan sistem multipartai dan kepartaian dalam suatu negara, al-Banna menolak pemberlakuan sistem multipartai dalam suatu negara, karena begitu banyaknya dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh sistem tersebut, Hasan al-Banna melihat bahwa banyaknya partai justru membawa mafsadat bagi umat, karena yang terjadi adalah perpecahan umat akibat sikap fanatik pada partai. Di samping itu, partai-partai yang ada juga tidak mewakili umat secara benar bahkan cenderung dibangun hanya untuk meraih kekuasaan tanpa memiliki basis ideologi Islam. tidak banyak perbedaan program dari semua partai, tetapi semuanya ingin berkuasa dan mendapatkan keuntungan materi. Oleh karena itu, al-Banna lebih setuju pada konsep partai tunggal agar rakyat Mesir khususnya saat itu bisa bersatu dan lebih mudah mencapai tujuan (Qaradhawi 2007, 50).

Mafsadat lain yang yang ditimbulkan dari pemberlakuan sistem multipartai terhadap politik Islam menurut Hasan al-Banna adalah,

a. Kelemahan Pemerintahan

Tidak ada satu pun yang membantah kenyataan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang sudah-sudah, secara berturut-turut lemah dalam menunaikan tugas-tugasnya. Ia telah kehilangan kewibawaan di mata umat untuk layak disebut sebagai sebuah pemerintahan. Hal ini bermula dari sikap melecehkan al-haq dan pada saat yang sama kebatilan tumbuh subur memenuhi ruh fanatisme kepertaian. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan, akibat tidak adanya batasan tanggung jawab yang jelas dan kekuatan untuk menunaikannya. Kalaupun mentalitas masyarakat Mesir ini tidak tercelup oleh kataatan dan ketundukan, sementara agenda kerja berjalan secara rutin begitu saja tanpa ada pembaharuan dan perbaikan tentu semuanya akan macet. Dan biasa dipastikan sistem manajemen yang goncang ini tidak mampu untuk bangkit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau mempersembahkan aktivitas yang bermanfaat buat mereka (al-Banna 1998, 315).

b. Kebesaran Undang-undang

Tidak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan undang-undang juga telah rapuh dan kehilangan wibawanya. Hal ini disebabkan oleh maraknya ketidakadilan dan tipu daya yang terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Kadang-kadang juga terjadi pelecehan terhadap hukum dengan cara menghapus sebagian butir atas nama kepentingan dan ambisi pribadi. Namun demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan ini diketahui siapa saja, maka hal itu akan berinteraksi dalam jiwa dan akan tetap memperoleh sebuah kebesaran undang-undang dan penghormatan terhadap hukum (al-Banna 1998, 315).

c. Fanatisme (Buta) Kepartaian

Tidak bisa dipungkiri bahwa para permusuhan dan kebencian telah bersemayam dalam jiwa pemimpin dan rakyat secara sama, akibat sistem kepartaian yang salah dan fanatisme yang membabi buta, umat Mesir tidak memahaminya sekedar sebagai perbedaan pendapat yang tidak sampai merusak solidaritas. Namun, mereka mendapati bahwa ia sudah menjurus pada permusuhan dan kebencian. Pandangan terhadap kemaslahatan umum maupun yang berubah menjadi pemboikotan setiap masalah yang umum maupun yang khusus. Bahkan kebencian itu sampai pada tingkatan memandang al-haq yang ada pada lawan partai sebagai kebatilan, dan sebaliknya kebatilan yang ada pada pendukung, dianggap sebagai al-haq (al-Banna 1998, 315).

Rasa dengki dan pemahaman yang keliru tentang kepartaian inilah yang akan berubah menjadi tradisi permusuhan. Akibatnya, sebagian besar potensi fikriyah dan amaliyah tercurah pada dua hal dan para pendukung partai akan tenggelam di dalamnya. Kedua hal itu adalah: terjebak dalam permusuhan partai, dan berusaha untuk menjegal dengan tipu dayanya. Pemerintah akan berusaha mengerahkan semua potensinya kepada dua hal ini, sementara dari kalangan oposisi juga tidak kalah perhatiannya dari pemerintah dalam hal ini. Demi realisasinya, banyak hak yang terlantar dan banyak kepentingan yang terabaikan. Partai yang kalah akan sedih, sementara lawan merasa lega dan musuh yang sesungguhnya (penjajah) akan memanfaatkan kepala negara (untuk dipermainkan) (al-Banna 1998, 316).

Kondisi seperti ini telah mengakibatkan kehancuran spiritual serta kerusakan dan kegoncangan material. Kondisi itu akan terus berlanjut dan mencapai puncaknya, sementara tidak ada lagi yang mampu melesatkan anak panah kesabaran. Sehingga diperlukan

revolusi total. Adakalanya para penguasa menyadari masalah ini dan benar-benar memperhatikannya, sehingga bersegera untuk melakukan perubahan yang shalih dengan pendapat sekaligus amalnya (al-Banna 1998, 316).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai Implikasi penerapan multipartai terhadap politik islam menurut Hasan al-Banna penulis dapat menyimpulkan bahwa implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari sistem ini sangat berimbas kepada politik islam, sebab sistem ini membuat rakyat Mesir saat itu terpecah belah karena banyaknya rakyat Mesir yang fanatik terhadap suatu partai, karena kafanatikkan tersebut partai-partai yang lain dimusuhi dan hanya partai yang didukung lah yang dianggap benar, sehingga politik Islam tidak menjadi dasar dari sistem multipartai saat itu, dan kefanatikkan terhadap kepartaian tersebut juga membuat pemerintahan menjadi lemah.